



**IMPLEMENTASI NILAI – NILAI DEMOKRASI DALAM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
SMP NEGERI 3 GRINGSING BATANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Rini Yuliana

NIM. 3401406555

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

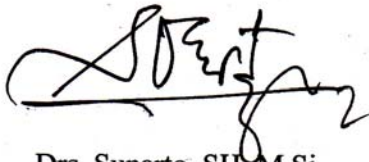
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Februari 2013

Pembimbing I



Drs. Sunarto, SH, M.Si
NIP.19630612 198601 1 002

Pembimbing II



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 19730331 200501 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 19650103 199002 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sunarto, S.H, M.Si.

NIP. 19630612 198601 1 002

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si

NIP. 19770715 200112 2 008

Mengetahui,

Dekan Ilmu Sosial UNNES

Dr. Subagyo, M.Pd

NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 2013

Rini Yuliana
NIM. 3401406555

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. “Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setelah jatuh” (Confosius).
2. Berdoa dan berusaha adalah kunci sukses untuk segalanya.

PERSEMBAHAN:

Dengan rasa syukurku kepada Allah SWT,
karya ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta yang selalu sabar, selalu mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mengalirkan do'a yang penuh berkah.
2. Kakak-kakakku yang selalu memotivasiku
3. Abi yang selalu menjadi penyemangatku
4. Sahabat-sahabatku
5. Teman-teman seperjuangan PKn 2006
6. Almamaterku UNNES

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis, melainkan diperoleh berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

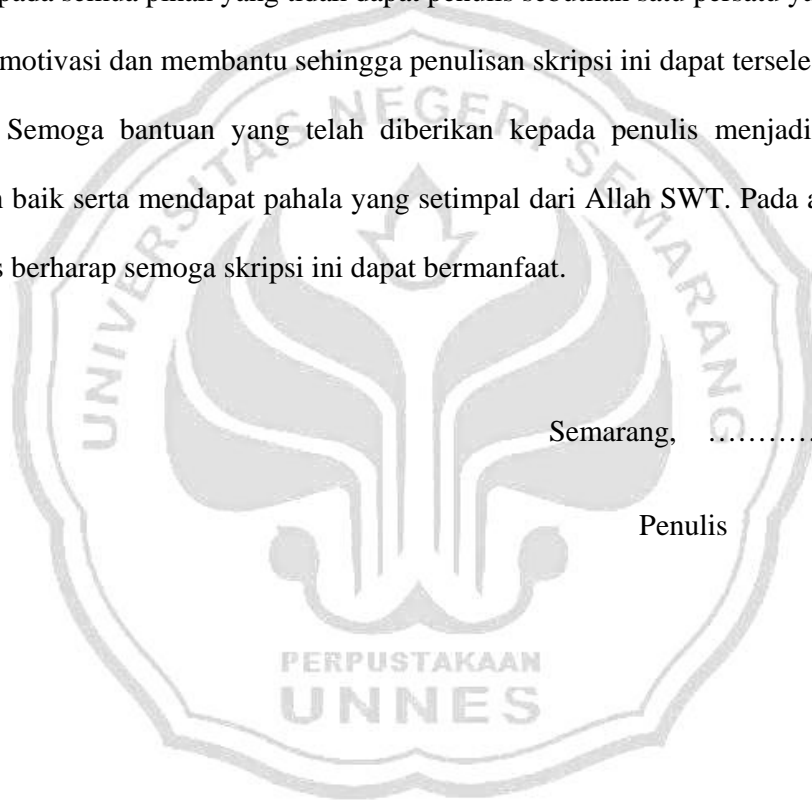
1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah menyediakan fasilitas untuk memperoleh ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sunarto, SH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah membekali ilmu dan motivasi penulis untuk terus belajar.
7. Kepala Sekolah, Guru, Siswa SMP Negeri 3 Gringsing Batang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi catatan amalan baik serta mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang,2013

Penulis



SARI

Rini Yuliana. 2013. *Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Demokrasi, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pendidikan moral merupakan suatu usaha membimbing perkembangan kepribadian peserta didik yang berlandaskan Pancasila. Pembelajaran PKn diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai demokrasi yang terwujud dalam bersikap dan bertindak dan dapat ditunjukkan dari beberapa hal antara lain: Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengakomodasi berbagai isu aktual yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua tantangan baru tersebut perlu dipertimbangkan dan diakomodasikan oleh guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dapat ditunjukkan dari beberapa hal, yaitu: (1) Toleransi, (2) kerjasama, (3) kebebasan berpendapat, (4) kebebasan berkelompok, (5) menghormati orang lain, (6) kepercayaan diri dan (7) kesadaran akan perbedaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, (2) Apakah faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang kurang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui lebih jelas bagaimana pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, (2) Mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang demokratis. Metode yang di gunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (interview), pengamatan (observation), dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data

dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun kelapangan, mempelajari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang telah dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antara siswa dengan pendidik yang diwujudkan dalam nilai-nilai demokrasi, yaitu: (1) Toleransi, (2) kerjasama, (3)kebebasan berpendapat, (4) kebebasan berkelompok, (5) menghormati orang lain, (6) kepercayaan diri dan (7) kesadaran akan perbedaan. Faktor pendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang diantaranya : (1) Kurikulum, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Budaya Sekolah yang menganut pada budaya disiplin dan (4) Kepemimpinan. Faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang diantaranya : (1) Dukungan orangtua, (2) Lingkungan masyarakat, (3) Keterbatasan biaya dan (4) Perbedaan individual.

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah: (1) Proses pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa tertarik dan tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran PKn. (2) Guru PKn selama pembelajaran perlu memberi kesempatan kepada siswa yang belum aktif untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok maupun diskusi kelompok, menumbuhkan keberanian siswa untuk berani tampil didepan dan (3) Orang tua hendaknya lebih memberikan perhatian kepada putra putrinya baik di rumah maupun di sekolah. Bentuk dukungan serta perhatian orang tua kepada putra putrinya antara lain dengan membimbing serta mengajarkan sikap menghargai/ menghargai anggota keluarga, toleransi, serta tanggung jawab, Keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn tidak terlepas dari peran orang tua dalam memberikan perhatian kepada para siswa. (4) Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan orang tua dalam upaya pengadaan fasilitas belajar yang memadai, dengan ketersediaan ruangan penunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih memadai, pembelajaran PKn dapat berjalan lebih efektif dan efisien tanpa mengganggu pembelajaran di kelas lain.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nilai-nilai Demokrasi	12
B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Sumber Data Penelitian	29
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	30
F. Validitas Data Penelitian.....	32
G. Model Analisis Data	35
H. Prosedur Penelitian	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 39
B. Pembahasan 69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 77
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
3. Instrumen Penelitian dan Pedoman Wawancara
4. Foto-foto hasil penelitian
5. Data hasil penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang.

Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya melalui metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat. Pendidikan tidak mengenal usia, dalam arti bahwa sampai usia tuapun manusia berhak mendapatkan pendidikan. Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya, dengan pendidikan manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (*nation character building*).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, bertanggung jawab dan bersosialisasi. Pendidikan ini dapat dilakukan oleh lembaga sekolah (formal) maupun lingkungan keluarga (informal) dan masyarakat (non formal). Dalam setiap kegiatan pendidikan hampir selalu melibatkan unsur-unsur yang terkait didalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu (1) peserta didik, (2) pendidik, (3) tujuan, (4) isi pendidikan, (5) metode, dan (6) lingkungan (Munib, 2004: 4).

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa telah diakui dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan ayat (3), menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan

bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinia IV (empat).

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis atau di dalam khasanah bahasa Indonesia disebut masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan mengakui akan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Sikap serta nilai yang telah diuraikan di atas yang merupakan ciri khas masyarakat demokrasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu proses. Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga disebut sebagai proses pemanusiaan. Masyarakat madani tidak lahir dengan sendirinya karena memerlukan sistem nilai yang berbeda dengan masyarakat otoriter. Oleh sebab itu perubahan dari masyarakat otoriter dan sentralistis menuju kepada masyarakat demokratis yang mengakui akan hak-hak asasi manusia serta menghargai adanya perbedaan antar anggotanya, dan dalam hal ini memerlukan suatu proses pembentukan pribadi melalui proses pendidikan, salah satunya adalah pendidikan di sekolah dimana unsur terpenting didalamnya selain guru, siswa, adalah pelajaran yang diperoleh siswa di sekolah. Pada umumnya proses pembelajaran Pkn yang dilaksanakan yaitu melalui pembelajaran satu arah, yaitu ceramah, siswa tidak diajak untuk turut

aktif, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik, karena siswa tidak memiliki tantangan dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru.

Proses pembelajaran demikian ini menyebabkan proses pembentukan suasana demokrasi di sekolah dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi gagal, karena siswa tidak distimulus untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat, melalui pendidikan disemaikan pola pikir, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam sebuah masyarakat.

PKn sebagai mata pelajaran pendidikan moral merupakan suatu usaha membimbing perkembangan kepribadian peserta didik yang berlandaskan Pancasila. Oleh sebab itu, pendidikan Pkn di setiap lembaga pendidikan harus tetap dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pendidikan Pkn juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi kepribadian peserta didik dengan mengangkat tema perkembangan IPTEK yang terjadi disekitar mereka. Pembelajaran Kewarganegaraan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kehidupan dunia pendidikan kita sekarang ini yang disertai dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut guru untuk dapat mengarahkan dan memotivasi siswa

dalam kegiatan yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif, misalnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta berpendapat secara demokratis, tentu saja ini sangat membantu memotivasi siswa untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis di lingkungan sekolah, dan siswa mampu menerapkannya baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.

Seiring dengan semakin canggihnya kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan demokratis (*democratic education*). Hal tersebut harus di kondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis (*democratic instruction*), agar terjadi proses belajar yang menyenangkan (*joyfull learning*). Diharapkan dalam proses belajar mengajar pun siswa aktif, tertarik, dan tertantang untuk membentuk pribadinya masing-masing. Sehingga nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan dapat diwujudkan. Dengan iklim yang demikian, pendidikan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap sang penciptanya. Bahwa apa yang dihadapi, apa yang

terjadi merupakan kehendak illahi yang harus dihadapi dan disyukuri. Sekarang ini, guru bidang studi Kewarganegaraan menghadapi suatu tantangan baru dalam upaya menerapkan konsep, nilai, dan cita-cita demokrasi yang sudah berkembang bukan saja sebagai sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetapi juga sebagai gerakan sosial yang universal dalam pergaulan antar bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi mata pelajaran yang berfungsi menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar semangat kebangsaan, mempersiapkan proses alih generasi secara bertanggung jawab, dan memberdayakan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan tantangan dan ketidakpastian. Atas dasar itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengakomodasi berbagai isu aktual yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua tantangan baru tersebut perlu dipertimbangkan dan diakomodasikan oleh guru dalam pembelajaran Kewarganegaraan sebagai upaya penggunaan kembali Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan semangat reformasi (jika warga negara Indonesia tetap berkomitmen Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang berjiwa demokratis maka hal ini akan berdampak positif bagi citra bangsa Indonesia dimata bangsa lain di dunia). Dengan demikian, dibutuhkan guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan yang benar-benar mempunyai kompetensi untuk mengembangkan esensi materi pembelajaran Kewarganegaraan yang kompleks tersebut. Akan tetapi, kenyataannya banyak guru PKn yang belum

mengembangkan potensi mereka dalam meningkatkan esensi mata pelajaran PKn yang kian kompleks, maka hubungan antara implementasi pembelajaran Kewarganegaraan yang demokratis dengan pembentukan pribadi peserta didik dalam rangka meningkatkan kesadaran pada nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya mencakup nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 3 GRINGSING BATANG”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang?
2. Apakah faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang demokratis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui lebih jelas bagaimana pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.
2. Mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan masukan-masukan tentang pendidikan PKn sebagai sarana untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.
 - b. Memberikan informasi bagaimana pelaksanaan atau implementasi dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.
 - c. Dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi kepala sekolah, guru di SMP Negeri 3 Gringsing Batang sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan penafsiran yang salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini, maka diberikan batasan-batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Implementasi

Pengertian implementasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan atau realisasi dari sebuah peraturan/ kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pihak tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang ditetapkan.

2. Nilai-nilai demokrasi

Nilai-nilai demokrasi adalah takaran, harga, sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (KBBI, 2005: 249), yang dimaksud warga negara disini adalah siswa siswi SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

3. Pembelajaran

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar (Sugandi, 2006: 9). Selain itu, Hamalik (2003: 57) berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi yaitu pendidik dan peserta didik, unsur material yaitu materi pelajaran yang diperoleh peserta didik, fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana yang disediakan seperti ruang kelas, perlengkapan yang terdiri dari buku-buku dan literatur yang menunjang kegiatan belajar dan prosedur yaitu suatu sistem atau cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

4. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

5. Sekolah Menengah Pertama

Sekolah menengah pertama adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran di sekolah tersebut.

6. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dan untuk memudahkan pembahasan, maka dalam skripsi ini di kelompokkan dalam V bab dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Bagian Awal Skripsi, berisi tentang: Halaman judul, Abstrak, Halaman Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Lampiran.
- II. Bagian Isi Skripsi, berisi tentang:
 - BAB I **PENDAHULUAN**, berisi tentang judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika skripsi.
 - BAB II **LANDASAN TEORI**, berisi tentang konsep-konsep, dalil-dalil serta teori yang menjadi referensi dalam skripsi. .
 - BAB III **METODE PENELITIAN**, berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, validitas data penelitian, model analisis data, dan prosedur penelitian.
 - BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.
 - BAB V **PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dan saran.
- III. Bagian Akhir Skripsi, berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nilai-nilai Demokrasi

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk (Soekanto, 1980: 45).

Nilai diartikan sebagai berikut: (1) Harga dalam arti takaran, misalnya nilai intan; (2) Harga sesuatu, misalnya uang; (3) Angka kepandaian; (4) Kadar, mutu; (5) Sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama (Soegito, dkk: 75-76).

Nilai tidak hanya tampak pada sebagai nilai bagi seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai suatu yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai merupakan suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat di indera, hal yang dapat diamati hanyalah obyek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak dapat mengindra kejujuran itu.
- 2) Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan.

Semua orang berharap untuk mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.

- 3) Nilai berfungsi sebagai motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

<http://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai-html>

Dalam filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Nilai logika adalah nilai benar salah
- 2) Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah
- 3) Nilai etika/moral adalah nilai baik buruk

<http://uzey.blogspot.com/2009/09/pengertian-nilai-html>

Berdasarkan klasifikasi diatas, dapat diperoleh sebuah contoh dalam kehidupan, jika seorang siswa dapat menjawab suatu pertanyaan, siswa tersebut benar secara logika, jika siswa tersebut keliru dalam menjawab kita katakan salah, kita tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabannya salah, buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya kita mengatakan demikian. Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, dan sebagainya. Nilai estetika bersifat subyektif pada diri yang bersangkutan, seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah. Nilai moral adalah suatu

bagian dari nilai yaitu nilai yang menangani perilaku baik dan buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan perilaku atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan nilai yang dikonkritkan menjadi kaidah-kaidah yang mengatur kepentingan hidup siswa sebagai pribadi, maupun berhubungan dengan orang lain.

2. Pengertian demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *demokrasi* berarti sebagai berikut: a) bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi); b) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dari akar kata di atas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu:

- 1) Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (*demos*: rakyat, dan *cratein*: memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah (Lincoln, 2003: 42-43).

- 2) Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat (Tim Abdi Guru, 2006: 130).

Nilai-nilai demokrasi yang patut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat, diantaranya:

- a) Penghargaan atas kesamaan (kesederajatan);
 - b) Penghargaan atas kebebasan;
 - c) Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untuk mencapai mufakat); dan
 - d) Penghargaan atas perbedaan (pluralitas).
3. Nilai-nilai demokrasi

Yang dimaksud nilai adalah takaran, harga, banyak sedikitnya isi dan mutu (KBBI, 2005: 783). Demokrasi mempunyai arti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara (KBBI, 2005: 249). Jadi yang dimaksud nilai-nilai demokrasi adalah takaran, harga sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari

keanekaragaman dalam masyarakat, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Lebih lanjut John Dewey dalam Zamroni (2007: 50) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah: toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku.

1) Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain.

2) Menghargai perbedaan pendapat

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai

untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

3) Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

4) Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia

Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

5) Pengendalian diri

Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

6) Kemanusiaan dan kebersamaan

Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

7) Kepercayaan diri

Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

8) Ketaatan pada peraturan yang berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan

ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

Wujud ketaatan dalam kehidupan bermasyarakat:

- a) Pengendalian tutur kata
- b) Tidak melukai perasaan orang lain
- c) Keluhuran nilai kemanusiaan
- d) Pengakuan adanya kelebihan manusia dan makhluk yang lain
- e) Perbuatan tidak merendahkan nilai kemanusiaan

(<http://id.shvoong.com/social-sciences/2128112-pengertian-ketaatan-dan-kepatuhan>)

Dengan demikian, nilai demokrasi secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan bertindak. Nilai yang dikemukakan diatas sesuai dengan apa yang menjadi nilai demokrasi dan perilaku yang ditanamkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan atau golongan sehingga perbedaan

pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

Dalam pembentukan perilaku dilakukan melalui pembiasaan (sosialisasi), termasuk perilaku demokratis. Wahana yang dapat dipergunakan untuk merekonstruksi perilaku demokratis adalah kelas, melalui kegiatan pembelajaran. Suasana kelas dalam proses pembelajaran mempengaruhi terjadinya proses sosialisasi. Pengembangan suasana kelas yang dilakukan guru dalam bentuk aplikasi metode mengajar secara kreatif menyebabkan suasana kelas dan pola sosialisasi menjadi demokratis, yang tercermin dari pola interaksi guru-siswa dan siswa-siswa.

Salah satu hakikat dari pendidikan demokrasi adalah pembelajaran peran dan partisipasi seluruh elemen sekolah untuk mengarahkan perjalanan pendidikan menuju cita-cita bersama. Bentuk pendidikan demokratis tersebut akan tumbuh dan kokoh jika di kalangan peserta didik tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka

dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan (Zamroni, 2001: 31-32).

Dalam hal ini peneliti hanya menekankan pada penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah, karena di sekolah pun semua persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Contoh persoalan sekolah yang bisa di musyawarahkan, antara lain: 1) diskusi kelas dalam penyusunan tata tertib sekolah, 2) pemilihan ketua kelas, 3) penyusunan regu piket kelas, 4) pemilihan ketua OSIS.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan nilai-nilai demokrasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai pedoman guru dan siswa untuk menciptakan keadilan dan kebersamaan.

B. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

Pembelajaran adalah suatu proses perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan (Depdikbud, 1994: 14). pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi yaitu pendidik dan peserta didik, unsur material yaitu materi pelajaran yang diperoleh peserta didik, fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana yang disediakan seperti ruang kelas, perlengkapan yang terdiri dari buku-buku dan literatur yang menunjang kegiatan belajar dan prosedur yaitu suatu sistem atau cara yang digunakan pendidik dalam

menyampaikan materi pelajaran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Pembelajaran ini diarahkan untuk mendorong individu belajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. Kegiatan belajar mengajar dilandasi oleh prinsip-prinsip berikut: 1) berpusat pada peserta didik, 2) mengembangkan kreativitas peserta didik, 3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, 4) mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan 6) belajar melalui berbuat (Munib, 2006: 26).

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *civics* atau *civics education* adalah pendidikan atau pengajaran untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebagai Warga Negara, dengan hak-hak dan berbagai tanggung jawabnya dalam diri peserta didik. Di Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan yang dikenal adalah pendidikan atau pengajaran “budi pekerti” yang menanamkan dalam peserta didik asas-asas moral, etika dan etiket yang melandasi sikap dan tingkah laku dalam pergaulan kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakatnya

(Widiastono, 2004: 25-26). Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Depdikbud, 1997: 6).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) berpikir kritis terhadap isu Kewarganegaraan, 2) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3) berkembang secara positif dan demokratis, dan 4) berinteraksi dengan bangsa lain (Priyanto, 2005: 4).

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai wahana dalam membentuk warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) persatuan bangsa, 2) nilai dan norma, 3) hak asasi manusia (HAM), 4) kebutuhan hidup, 5) kekuasaan dan politik, 6) masyarakat demokratis, 7) pancasila dan konstitusi negara, dan 8) globalisasi (Priyanto, 2005:5).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan umumnya melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, yang meliputi:

1) konstruktivisme, 2) inkuiri, 3) bertanya, 4) masyarakat belajar, 5) pemodelan, 6) refleksi, dan 7) penilaian otentik (Priyanto, 2005: 5). Selain pendekatan pembelajaran diatas juga diperlukan berbagai komponen pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Komponen pembelajaran tersebut diantaranya: a) materi pembelajaran, b) media pembelajaran, c) metode pembelajaran, d) pendekatan pembelajaran.

Berlakunya kurikulum 2004 yaitu Berbasis Kompetensi, secara struktur PPKn diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari materi yang dikembangkan secara paralel dengan materi tentang nilai-nilai demokrasi yang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Kesepuluh pilar tersebut adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang manjunjung hak asasi manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga Negara, demokrasi yang menetapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.

Sekolah pada zaman orde baru berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu, dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum Kewarganegaraan yang mendasarkan pada disiplin yang kaku dan bersifat indoktrinatif. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan terbentuknya perilaku politik tertentu telah pula dilaksanakan melalui berbagai upaya seremonial. Tetapi sejarah telah menunjukkan tidak ada upaya indoktrinasi yang berhasil. Dalam pendidikan politik yang bersifat indoktrinatif, para siswa mengikuti kegiatan seremonial dalam bentuk berbagai upacara dengan penuh keterpaksaan. Pelajaran yang diterima di kelas tidak cocok dengan realitas yang ada di masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan di penuh dengan doktrin dan berbagai informasi yang tidak diperlukan, yang harus di hafal tanpa memahami makna sebenarnya. Sebab, apabila siswa memahami doktrin yang dipelajari maka akan diketemukan bahwa apa yang dipelajari berbeda dengan apa yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, di awal proses reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan mutlak diperlukan. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan atau *civics* harus dirombak secara menyeluruh. Prinsip indoktrinasi harus diminimalkan karena tidak mungkin dihilangkan dan diganti dengan prinsip dialog. Aktivitas yang berbau paksaan harus diubah menjadi aktivitas dengan nuansa kesadaran. Tekanan pada prestasi dan kerja individual perlu dilengkapi dengan tekanan prestasi dan kerjasama kelompok. Materi

civics ditekankan pada 4 (empat) aspek yang meliputi aspek sejarah asal mula demokrasi dan perkembangannya, perkembangan demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi dalam Pancasila dan UUD 1945, dan tantangan demokrasi dalam era modern (Zamroni, 2001: 21-23).

Seorang guru diharapkan dapat menggunakan sebuah model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, strategi atau metode pembelajaran PKn yang efektif dan bervariasi. Dalam pembelajaran harus memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik. Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan metode-metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta didik.

Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut dikemukakan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru, diantaranya yaitu: 1) metode demonstrasi, 2) metode inkuiri, 3) metode penemuan, 4) metode eksperimen, 5) metode pemecahan masalah, 6) metode karyawisata, 7) metode perolehan konsep, 8) metode penugasan, 9) metode ceramah, 10) metode tanya jawab, dan 11) metode diskusi (Mulyasa, 2005: 107-117).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menerangkan kebenaran (Rachman, 1999: 2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2002: 3). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan melalui orang-orang serta pengamatan perilaku.

Alasan penggunaan pendekatan ini adalah:

1. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti melakukan penelitian pada latar ilmiah, maksudnya adalah peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengamati pelaksanaan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.
2. Dengan pendekatan kualitatif tidak ada teori yang apriori artinya peneliti dapat mempercayai apa yang di lihat sehingga bisa sejauh mungkin menjadi netral. Dalam hal ini, peneliti mengamati dan

mencatat semua data yang ada dengan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahi.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan dan orientasi yang diharapkan tidak mengurangi upaya memperoleh gambaran umum yang mungkin terjadi di dalam cakupan wilayah yang lebih luas, maka dari itu peneliti memilih SMP Negeri 3 Gringsing, yang berlokasi di Batang Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian, karena nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran PKn diharapkan dapat diterapkan oleh guru maupun siswa siswinya dalam proses belajar mengajar (PBM) dimana para peserta didik diajak untuk menunjukkan keberanian/ percaya dirinya dalam berbicara didepan umum, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, berpikir untuk lebih kritis dan kreatif.

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang di peroleh (Moleong, 2000; 62).

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat dalam imlementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang demokratis.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari informan-informan dengan cara membatasi jumlah informan, akan tetapi apabila informan atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data tentang pelaksanaan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung dan wawancara terhadap informan lapangan.

Informan lapangan yang meliputi:

- a. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gringsing, Bapak Paiman, S.Pd.
- b. Guru mata pelajaran PKn, Bapak Mahmudi Sholeh, S.Pd.
- c. Siswa dan siswi SMP Negeri 3 Gringsing kelas IX (sembilan), karena kelas IX (sembilan) telah memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, dari sumbernya yaitu buku-buku literatur, majalah, surat kabar, makalah-makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan untuk di jadikan pelengkap informasi dalam penelitian tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rachman (1999: 71), bahwa penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Metode yang di gunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000: 135). Wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman

wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data tentang upaya yang dilakukan guru yang terkait dengan Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada peserta didik melalui mata pelajaran PKn.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Guru pengampu mapel PKn kelas IX, Bapak Mahmudi Sholeh, S.Pd, dan siswa kelas IX, dengan teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data tentang Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

2. Pengamatan (*observation*)

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 1999: 7). Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PKn tentang implementasi nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku

